

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2019**



**BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**TAHUN 2019**





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 – 21007  
SINTANG – 78611

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M. Med.PH


Jabatan : BUPATI SINTANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
**dr. H. JAROT WINARNO, M. Med.PH**

Sintang, Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630424 198403 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan daerah/Wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat persiapan, kesiapan dan kelayakan pembentukan Kecamatan baru</li> <li>- Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang</li> <li>- Tingkat Kejelasan dan kepastian batas kecamatan</li> </ul>	<p>90%</p> <p>80%</p> <p>85%</p>
2.	Terciptanya Undang undang dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian produk perundang undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Raperda yang telah di Perdakan</li> <li>- Tingkat Penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai tuntas</li> <li>- Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya penyebarluasan informasi yang tepat, cepat dan akurat dengan melakukan kerjasama dengan mass media.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang seharusnya diliput atau diberitakan</li> <li>- Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>
4.	Terlaksananya tata kelola yang efektif dalam pengelolaan batas wilayah negara, potensi dan infrastruktur wilayah perbatasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sintang</li> <li>- Tingkat pembangunan wilayah perbatasan.</li> <li>- Tingkat kualitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan.</li> <li>- Tingkat perencanaan pembangunan daerah kawasan perbatasan.</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
5.	Tersusunnya Juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian</li> <li>- Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan</li> <li>- Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan perekonomian sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya</li> <li>- Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
6.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan mental spritual, pengadministrasian bantuan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pengetahuan keterampilan penerima bantuan dalam penyusunan SPJ</li> <li>- Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sintang</li> <li>- Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>



1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin</li> <li>- Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja</li> <li>- Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
10.	Tersusun dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rancangan perda perangkat daerah dan perbup SOTK Perangkat Daerah</li> <li>- Jumlah analisis jabatan perangkat Daerah yang disusun</li> <li>- Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun</li> <li>- Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>- Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan</li> <li>- Persentase Penguatan SAKIP</li> <li>- Persentase pembinaan percepatan reformasi birokrasi</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>1 dok</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p>
11.	Optimalisasi Penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun</li> <li>- Jumlah dokumen rencana kerja Sekretariat Daerah</li> <li>- Jumlah laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah</li> <li>- Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah</li> <li>- Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah</li> <li>- Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah</li> <li>- Tersusunnya dokumen anggaran Sekretariat Daerah</li> <li>- Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017-2021</li> <li>- Jumlah Surat Keputusan pendukung</li> </ul>	<p>100%</p> <p>1 dok</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>2 Dok</p> <p>2 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>1 Dok</p> <p>2 Dok</p>

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 18,836,042,590	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 5,467,700,500	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 127,620,000	APBD
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp 701,299,803	APBD
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 285,727,470	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Rp 6,948,747,740	APBD
7	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Rp 653,023,000	APBD
8	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN DAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	Rp 49,839,000	APBD

9. PROGRAM ...

1	2	3	4
9	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Rp 113.342.320	APBD
10	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp 1.310.024.019	APBD
11	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Rp 470.135.390	APBD
12	PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH	Rp 808.808.300	APBD
13	PROGRAM BANTUAN HUKUM	Rp 425.024.930	APBD
14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH	Rp 564.168.000	APBD
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp 77.354.000	APBD
16	PROGRAM PEMERINTAHAN PENINGKATAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 593.398.000	APBD
17	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA	Rp 679.800.500	APBD
18	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	Rp 1.063.549.200	APBD
19	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Rp 236.243.500	APBD
20	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Rp 155.759.850	APBD
21	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Rp 55.338.764	APBD
22	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Rp 3.178.323.880	APBD
23	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Rp 101.974.300	APBD
24	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	Rp 200.437.300	APBD
25	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Rp 112.184.350	APBD
26	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Rp 143.695.650	APBD
27	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	Rp 745.243.100	APBD
28	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 319.659.550	APBD
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Rp 175.957.100	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 44.600.422.106</b>	


**BUPATI SINTANG,**  
**dr. H: JAROT WIDARNO, M. Med.PH**

Sintang, Maret 2019  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
  
**DR. YOSEFA HASNAH, M.Si**  
 Pemangku Utama Madya  
 NIP. 19630424198403 2 008